

MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT PESISIR DENGAN PENDEKATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR (PEMP)

Oleh :
Sahudiyono¹⁾

This research is conducted to find out and to describe the implementation of PEMP program in Bantul regency. The type of the research is qualitative with the descriptive method which uses the case study approach. Data collecting is done with the interview method, observation and the use of secondary data. Interview is conducted by using guidance interview, informal discussion and opened permanent interview.

The results of analysis show (1) society participation is differenciated in two levels, namely real participation and quasi-participation, (2) the result of some training program really can be felt and give benefits, however there are still also a training which does not give any results and benefits. The really useful training are trainings which are applicable and/or productive like management training and fish manufacture training, whereas the useful training that does not applicable and unproductive is the training of navigation, because the lessons in this training is projected for fishermen who operate motor ship with power of 10 GT minimum whereas fishermen in Bantul only operate the speed boat patch (PMT) with power 15 House Power maximum. (3) the society self-reliance can be seen in the case of choosing the profession or the type of business, in doing the investment and capital and also entrepreneurship culture, (4) institution reinforcement in the meaning of institution (manufacture) and also institution in social norm meaning. The institutions which show the reinforcement marking are LKM Swamitra Mina, Kedai Pesisir, and Fisherman Group "Mina Bahari 45", and also Society of Coastal Woman, the inforcement LEPP-M3 still has the be continuously done. There are two institutions namely P3MP and Business Clinic, which their existences still require to be re-evaluated (5) the partnership cooperation is still in the form of the intra business scale partnership, whereas mutualism-partnership is still in the exploratory level.

A. LATAR BELAKANG DAN RUMUSAN MASALAH

Paradigma pembangunan yang akhir-akhir ini sering dibicarakan dalam berbagai kesempatan baik di tingkat internasional, nasional maupun lokal adalah paradigma pemberdayaan masyarakat. Paradigma ini lahir sebagai koreksi atas paradigma yang sudah ada

sebelumnya. Melalui paradigma ini masyarakat diberikan hak dan kesempatan untuk mengelola sumberdaya alam dalam rangka melaksanakan pembangunan. Hadirnya paradigma ini berinisiatif untuk mengubah kondisi dengan memberikan kesempatan kepada kelompok miskin untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah mereka tentukan.

1. Drs. Sahudiyono, MPA adalah Dosen Kopertis Wil. V dipekerjakan pada Akademi Maritim Yogyakarta, alumnus program Pascasarjana Ilmu Administrasi Negara Fisipol UGM Yogyakarta

Di samping itu masyarakat miskin juga diberikan kesempatan untuk mengelola dana sendiri, baik yang berasal dari pemerintah maupun pihak lain. Merebaknya paradigma pemberdayaan sangat erat kaitannya dengan *good governance*. (Sulistiyani, 2004: 75)

Keterbelakangan masyarakat menjadi fokus utama dari paradigma ini, karena pemberdayaan tanpa partisipasi masyarakat adalah sia-sia. Partisipasi dalam hal ini mencakup partisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun evaluasi program-program pembangunan yang telah ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Disamping itu, masyarakat juga diberikan kesempatan untuk mengelola dana sendiri, baik yang berasal dari pemerintah maupun pihak lain. Namun disadari pula bahwa masyarakat terutama masyarakat miskin adalah masyarakat yang lemah, tidak (kurang) berdaya, dan memiliki kemampuan aksesibilitas yang rendah. Untuk itu maka diperlukan adanya kerjasama di antara pihak-pihak yang lebih berdaya dan memiliki aksesibilitas yang tinggi terhadap berbagai peluang. Pihak-pihak dimaksud meliputi, pemerintah, swasta dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya (*civil society*).

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat pesisir, tahun 2000 Departemen Kelautan dan Perikanan meluncurkan kebijakan/program yang disebut dengan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), yang menjadi salah satu prioritas utama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Program PEMP bertujuan untuk meningkatkan kesejah-

teraan masyarakat pesisir melalui pengembangan kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, partisipasi masyarakat, penguatan modal, dan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat pesisir. Peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya meliputi aspek ekonomi, tetapi juga meliputi aspek-aspek lainnya seperti aspek sosial, lingkungan, sumberdaya perikanan, dan laut serta pemukiman dan infrastruktur. Dalam program ini masyarakat pesisir diperlakukan sebagai subyek dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi dan monitoring. Sumber inspirasi berasal dari masyarakat pesisir itu sendiri dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat (*bottom-up*) sehingga partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam pelaksanaannya. Partisipasi yang diharapkan dari masyarakat pesisir adalah partisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat untuk mendorong kemandirian masyarakat pesisir. Selain partisipasi masyarakat diharapkan pula melalui program ini akan memperkuat kelembagaan sosial masyarakat pesisir yang mandiri. Program PEMP bukan bersifat *charity* (hibah) tetapi *empowerment* (pemberdayaan).

Masyarakat pesisir yang dimaksud dalam program PEMP meliputi, pertama, masyarakat pesisir yang kurang berdaya (miskin), menetap di daerah pantai dan pulau-pulau kecil. *Kedua*, masyarakat pesisir yang memiliki pekerjaan atau berusaha sebagai nelayan, pembudidaya ikan, pedagang hasil perikanan, pengolah ikan, usaha jasa perikanan, dan pariwisata bahari serta usaha/kegiatan

yang terkait dengan perikanan dan kelautan. (Dep. Kelautan dan Perikanan, 2004)

Kabupaten Bantul sebagai salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki lima desa pesisir tersebar ke dalam tiga wilayah kecamatan yakni kecamatan Srandakan satu desa pesisir (desa Poncosari), kecamatan Sanden dua desa pesisir (desa Gadingsari dan desa Srigading), serta kecamatan Kretek dua desa (desa Parangtritis dan desa Tirtohargo) mendapatkan program PEMP sejak tahun 2001, sampai dengan tahun 2007 telah memperoleh alokasi dana DEP total sejumlah Rp. 3.260.592.000,-. Namun karena dana DEP tahun 2007 sebesar Rp.458.545.000 tidak dapat dicairkan, maka total DEP yang telah direalisasikan sampai dengan tahun 2005 sebesar Rp. 2.802.047.000, sementara untuk tahun 2006 tidak ada alokasi program PEMP bagi kabupaten Bantul.

Permasalahan pokok yang dihadapi dalam upaya pemanfaatan potensi wilayah pesisir dan masyarakat nelayan di Kabupaten Bantul adalah masih belum memadainya sarana-prasarana serta infrastruktur, keterbatasan pengetahuan/ketrampilan dan rendahnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, keterbatasan pasar dan jalur distribusinya serta keterbatasan modal yang kesemuanya ini mengakibatkan tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir relatif masih rendah. Sarana dan prasarana tersebut di antaranya meliputi: pelabuhan pendaratan ikan atau *jetty* dan fasilitas pendukungnya, *groin* pemecah ombak untuk mendukung peningkatan hasil tangkapan, serta armada kapal penangkap ikan yang

masih menggunakan kapal motor tempel ukuran kecil kurang dari 5 GT. (CV Karya Mandiri Sejahtera, 2007: 13-18).

Usaha penangkapan ikan laut di Kabupaten Bantul baru marak berkembang mulai tahun 2000 dengan didatangkannya nelayan dari luar daerah. Upaya ini cukup mampu menarik pengusaha-pengusaha lokal sehingga mereka melirik usaha penangkapan ikan di laut walupun masih terbatas pada kapal motor tempel dengan kekuatan maksimal 15 PK. Produksi penangkapan yang ada di Kabupaten Bantul pada tahun 2006 sebanyak 97.920,57 kg. Produksi penangkapan tersebut jika dibandingkan dengan potensi lestari perikanan pantai DIY sebesar 3.400 ton masih sangat jauh, sehingga memerlukan penanganan yang lebih serius untuk dapat mengangkat masyarakat pesisir Kabupaten Bantul menjadi masyarakat yang taraf hidupnya sejajar dengan masyarakat lain.

Dari deskripsi terkait dengan kondisi masyarakat pesisir di Kabupaten Bantul di atas, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah "Bagaimana upaya memberdayakan masyarakat pesisir melalui program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) oleh Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bantul?"

B. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan program PEMP yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan

Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bantul pada masyarakat pesisir di Kabupaten Bantul. (2) Memaparkan lembaga-lembaga yang dibentuk dan mekanisme kerjanya dalam melaksanakan program PEMP.

C. TINJAUAN TEORITIK

Menurut Suharto (2005: 58) dikatakan pemberdayaan secara spesifik harus ditujukan kepada kelompok orang yang rentan dan lemah; lebih jauh dikatakan sebagai berikut:

“Pemberdayaan menunjuk pada orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan, (b) menjangkau sumber-sumber produktif, yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa yang mereka perlukan, dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka” (Suharto, 2005: 58)

Dari pendapat Suharto tersebut nampak jelas bahwa dengan program pemberdayaan tersebut diharapkan masyarakat yang semula berada pada kelompok rentan dan lemah secara gradual mengalami peningkatan menuju kondisi yang lebih baik dan memiliki kekuatan atau kemampuan sehingga mereka tidak lagi berada atau terbebaskan dari belenggu yang selama ini meng-

himpit mereka. Selain itu dengan pemberdayaan masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan-keputusan yang dapat mempengaruhi masyarakat bersangkutan. Dalam hal ini masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta secara aktif dalam setiap proses perencanaan, implementasi, pengawasan, monitoring sampai dengan evaluasi dan perumusan umpan balik (*feedback*).

Boon 2004 (dalam Darwin, 2007: 3) mengatakan pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai peningkatan kapasitas perseorangan atau kelompok untuk mempengaruhi pengembangan dan pilihan hidup dan mentransformasikan pilihan tersebut ke dalam tindakan yang diinginkan dan ke dalam hasil bagi pengembangan dari komunitas mereka. Masyarakat yang berdaya adalah masyarakat yang memiliki kapasitas untuk mengenali permasalahan mereka sendiri, dan mengatasi masalah tersebut dari kekuatan mereka sendiri. Lebih dari itu, masyarakat yang berdaya adalah masyarakat mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan/konteks, baik berupa kesempatan atau ancaman.

Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi penting dari program penanggulangan kemiskinan. dalam strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK), pemberdayaan masyarakat adalah satu pilar dari lima pilar penanggulangan kemiskinan. Kelima pilar yang dimaksud adalah: perluasan kesempatan, pemberdayaan kelembagaan masyarakat, peningkatan kapasitas, perlindungan sosial dan penataan kemitraan global. (Darwin,

2007: 3). Dari pendapat tersebut, pemberdayaan kelembagaan masyarakat baik kelembagaan sosial, kelembagaan ekonomi dan kelembagaan politik yang ada merupakan kelembagaan yang mampu memfasilitasi atau menjadi sarana bagi masyarakat miskin untuk berpartisipasi secara aktif dalam setiap program yang diselenggarakan untuk mereka. Artinya, keberadaan lembaga-lembaga tersebut harus bersifat mempermudah bagi masyarakat miskin, bukan sebaliknya menjadi penghambat atau mempersulit mereka.

Penguatan kelembagaan dalam hal ini meliputi tiga hal: (1) peningkatan daya kritis. (2) penguatan berbagai lembaga masyarakat di tingkat yang paling dasar dan (3) Pengembangan jaringan kerjasama di antara elemen-elemen masyarakat seperti petani, nelayan, perguruan tinggi, LSM dan lain-lain. Langkah ini perlu dilakukan dalam rangka mendorong pemberdayaan masyarakat perdesaan. (Sunartiningsih, 2004: 54)

Peningkatan kapasitas (*capacity building*) menjadi salah satu pilar yang sangat penting di dalam program penanggulangan kemiskinan. Berbagai macam kegiatan dapat dicanangkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, diantaranya adalah pendidikan dan latihan dalam suatu profesi atau pekerjaan tertentu. Pendidikan dan pelatihan dalam rangka memberdayakan masyarakat dilakukan untuk menumbuhkan keinginan dan motivasi dalam diri setiap orang untuk menubah keadaan ke arah yang lebih baik. Moeljarto Tjokrowinoto yang dikutip oleh Medelina K. Hendytio dan J. Babari (dalam Prijono, Onny S. dan AMW

Pranarka (penyunting), 1996: 185) mengatakan :

“Proses pendidikan tidak hanya mentransfer pengetahuan, ketrampilan, dan tata nilai tertentu tetapi juga berfungsi mengalokasikan peranan dengan mengantarkan subyeknya untuk menduduki posisi sosial tertentu. Jadi, pendidikan dapat mengubah persepsi seseorang tentang posisi normatifnya di ruang sosial, ekonomi, dan budaya”

Oleh karena itu, pendidikan mampu meningkatkan motivasi dan aspirasi masyarakat. Dengan pendidikan yang meningkat, orang termotivasi untuk mencapai tingkat kehidupan yang lebih baik. Untuk itu mereka akan mencari jalan guna mewujudkan aspirasinya, termasuk menuntut pelaksanaan peraturan maupun perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang hak dan kewajiban mereka.

Pemberdayaan bertujuan untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi (Sulistiyani, 2004: 80) kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan, serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif, dan sumber daya lainnya yang bersifat fisik-material. Kartasmita (1996:60) menegaskan, kemandirian adalah hakekat dari kemerdekaan, yaitu hak dari setiap bangsa untuk menen-

tukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi dirinya. Oleh karena itu, pembangunan sebagai usaha untuk mengisi kemerdekaan haruslah merupakan upaya membangun kemandirian. Kemandirian dengan demikian adalah paham yang proaktif dan bukan reaktif atau defensif. Kemandirian merupakan konsep yang dinamis karena mengenali bahwa kehidupan dan kondisi saling ketergantungan senantiasa berubah, baik konstelasinya, perimbangannya, maupun nilai-nilai yang mendasari dan mempengaruhinya. Salah satu bentuk kemandirian masyarakat dapat ditunjukkan oleh tumbuhnya kultur kewirausahaan pada diri seseorang. Kultur kewirausahaan merupakan kondisi seseorang yang dengan penuh percaya diri mampu mengambil keputusan dalam segala situasi atas segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan dan kelangsungan hidupnya. Dalam diri seseorang yang telah tertanam kultur kewirausahaan akan lebih menjamin keberhasilan dalam mengembangkan usahanya bila dibandingkan dengan orang yang belum memiliki kultur kewirausahaan.

Kemitraan menjadi strategi yang penting untuk menjamin keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat modern yang telah maju lebih diarahkan pada penciptaan iklim yang menunjang dan peluang untuk tetap maju, sekaligus pada penanaman pengertian bahwa suatu saat mereka wajib membantu yang lemah. Ada beberapa model yang dapat diterapkan untuk program pemberdayaan masyarakat. Model yang *pertama*, bertolak dari pemahaman akan dunia organisma baik yang bersel satu

yang tidak kasat mata, maupun hewan yang dapat dilihat, maka kemitraan dibedakan menjadi (Sulistiyani, 2004: 130) : (1) *pseudo-partnership* atau kemitraan semu, (2) *mutualism-partnership* atau kemitraan mutualistik, dan (3) *conjugation partnership*, atau kemitraan melalui peleburan dan pengembangan.

Model kemitraan lainnya dikemukakan oleh Kartasasmita (1996:192-193) dengan memilah kemitraan ke dalam 4 (empat) aspek, yakni (1) kemitraan antar skala usaha, (2) kemitraan usaha antar daerah atau antar kawasan, (3) kemitraan usaha antar sektor, dan (4) kemitraan dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan iptek.

D. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Data yang terkait dengan deskripsi program PEMP dan deskripsi lokasi penelitian dengan memanfaatkan data sekunder dari Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (Dinas KPP) Kabupaten Bantul dan instansi terkait lainnya sedangkan untuk data primer mengambil lokasi di desa Parangtritis kecamatan Kretek Kabupaten Bantul. Dipilihnya desa Parangtritis kecamatan Kretek sebagai sasaran pengamatan penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa "Parangtritis" menjadi *ikon* pariwisata kabupaten Bantul yang telah menjadi daya tarik nasional bahkan internasional dengan adanya obyek pariwisata internasional pantai Parangtritis yang sudah "melegenda"; dengan kata lain

Parangtritis menjadi *benchmarking* dari kabupaten Bantul karena sebagai salah satu andalan komoditas pariwisata pemerintah dan masyarakat Bantul pada umumnya. Selain itu dalam kaitannya dengan implementasi program PEMP, desa Parangtritis menjadi representasi desa yang paling menarik karena keberadaan TPI Depok beserta pasar ikan yang paling padat dikunjungi wisatawan terutama pada hari Sabtu/Minggu dan hari-hari libur nasional lainnya.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemantauan (*observation*), wawancara (*interview*) dan analisis dokumen (*Document analysis*). Pemantauan atau observasi, digunakan untuk melihat secara langsung aktivitas pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Bantul atau aktivitas/perilaku para *stakeholders* yang menjadi sasaran pengamatan. Informan penelitian atau subjek penelitian terdiri dari pihak-pihak tertentu yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir terdiri atas beberapa komponen yakni pejabat Dinas PKP, Tenaga Pendamping Desa (TPD), Pengurus koperasi LEPP-M3, Pengelola Unit-unit usaha, pengurus kelembagaan, pengurus dan anggota kelompok masyarakat pemanfaat.

E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Masyarakat pesisir pada umumnya dihadapkan pada empat permasalahan besar yakni ketidakmampuan mengambil bagian dalam ekonomi pasar, lemah

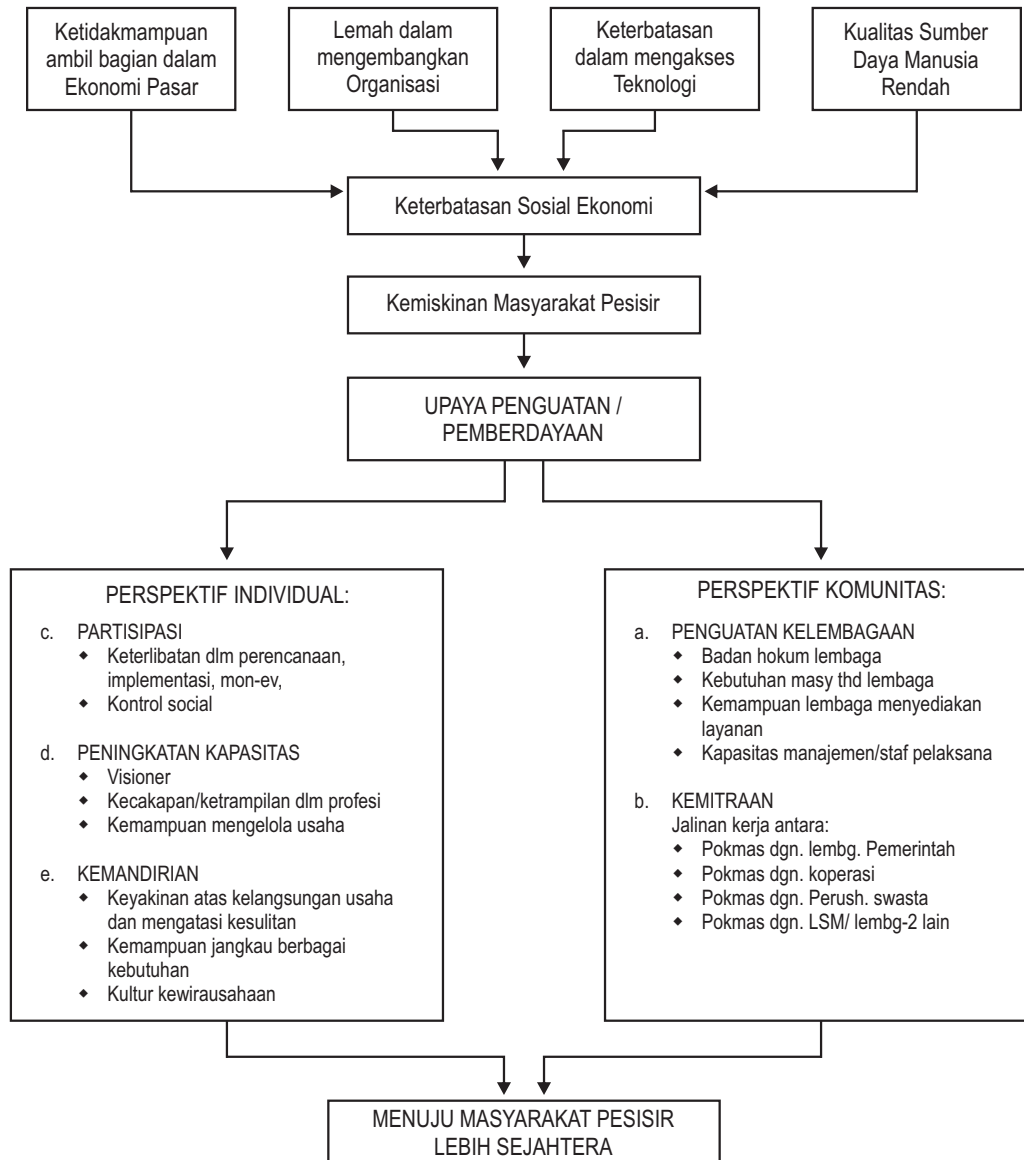
dalam mengembangkan organisasi, keterbatasan dalam mengakses teknologi, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia, sehingga mereka berada dalam keterbatasan secara sosial-ekonomi. Akibat lebih lanjut adalah kondisi kemiskinan yang dihadapi oleh masyarakat pesisir. Untuk mengatasi hal itu, maka diperlukan suatu upaya konkrit untuk penguatan dan pemberdayaan agar dapat melepaskan diri dari kemiskinan. Dengan perkataan lain diperlukan sebuah kebijakan yang dapat memberdayakan masyarakat pesisir agar secara berangsur-angsur dapat melepaskan diri dari kemiskinan yang melilit mereka. Upaya penguatan/pemberdayaan harus mencakup dua perspektif sekaligus, yakni perspektif komunitas dan perspektif individual. Dalam perspektif komunitas, pemberdayaan masyarakat pesisir meliputi dua dimensi yakni penguatan kelembagaan dan kemitraan. Sedangkan dalam perspektif individual upaya pemberdayaan masyarakat pesisir meliputi tiga dimensi, yakni partisipasi masyarakat, peningkatan kapasitas dan kemandirian. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar 1 Kerangka Pembahasan.

1. Perspektif Individual dalam Pelaksanaan Program PEMP

a. Partisipasi Masyarakat Pesisir dalam Program PEMP

Pemberdayaan masyarakat dikatakan berhasil apabila dalam kegiatan yang dilakukan dari setiap program pemberdayaan mampu melibatkan peran serta secara aktif masyarakat

Gambar 1. Kerangka Pembahasan



sasaran yang dimulai dari proses penetapan tujuan, proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi. Hasil pengamatan ditemukan adanya 2 (dua) tipe partisipasi masyarakat terhadap program yakni partisipasi riil (*real participation/actual participation*), dan partisipasi pura-pura atau partisipasi semu (*quasi participation*)

Pertama, partisipasi riil yaitu kesediaan anggota masyarakat untuk turut serta terlibat di dalam kegiatan PEMP Betul-betul tulus atas kesadaran dan kemauannya sendiri tanpa pengaruh dari pihak lain dari manapun asalnya maupun pertimbangan-pertimbangan khusus lainnya. Masyarakat dengan sadar melibatkan diri dalam kegiatan karena dilandasi keyakinan yang kuat bahwa peran sertanya di dalam kegiatan ini akan membawa manfaat yang besar bagi kepentingan dan kemajuan bersama secara komunal (*community results*) maupun secara lebih spesifik bermanfaat bagi dirinya sendiri secara individual (*individual results*). Dengan demikian, motivasi untuk berperan serta dalam sebuah kegiatan atau program semata didasari pada keyakinan akan hasil atau manfaat yang dapat diperoleh setelah kegiatan tersebut diikuti. Sebagai contoh partisipasi masyarakat pesisir yang tergabung dalam kelompok "Mina Bahari 45". Tingkat partisipasi anggota di dalam kelompok ini tidak hanya sebatas karena adanya program PEMP semata atau program pemberdayaan sejenis, tetapi mereka betul-betul berpartisipasi karena telah dapat merasakan manfaatnya bagi kelangsungan hidup dan kelangsungan usaha/profesi yang telah dilakukan selama ini.

Anggota selalu dilibatkan dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan kepentingannya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi.

Kedua, partisipasi pura-pura atau partisipasi semu (*quasi participation*) yaitu peran serta atau keterlibatan seseorang dalam sebuah kegiatan atau program yang setengah hati, dalam artian bahwa seseorang bersedia mengikuti kegiatan atau program bukan berangkat dari pertimbangan atau keyakinan yang kuat bahwa kehadiran atau keterlibatannya akan membawa manfaat baik bagi kelompok (*community results*) maupun bagi dia sendiri secara individual (*individual results*). Keikutsertaan seseorang dalam sebuah kegiatan lebih didasari pada pertimbangan-pertimbangan seperti sekedar menghormati kepada pihak yang mengundang/mengajak, karena rasa enggan atau "ewuh prekewuh" kepada seseorang atau tokoh tertentu atau sekedar gengsi, karena kedudukan atau jabatan formalnya atau sekedar karena status atau posisi dalam strata sosial masyarakatan mengharuskan dirinya mau tidak mau harus hadir dan/atau ikut terlibat di dalam kegiatan tertentu. Namun demikian ada juga partisipasi semu yang kemudian berubah menjadi partisipasi riil, yakni keterlibatan seseorang dalam suatu kegiatan tertentu dalam program PEMP yang pada awalnya bukan didasarkan pada kemauan yang timbul dari dalam lubuk hatinya, tetapi kemudian setelah dirasakan hasil atau manfaat khususnya bagi dirinya, maka keterlibatan yang tadinya hanya setengah hati atau hanya sekedar ikut-ikutan kemudian berubah

menjadi keterlibatan yang sungguh-sungguh dengan motivasi yang benar-benar timbul dari dalam lubuk hatinya.

Partisipasi yang ideal adalah partisipasi yang sudah berlangsung sejak perencanaan bahkan jauh sebelum itu sejak penetapan tujuan yang diinginkan, saat pelaksanaan program, sampai dengan monitoring, evaluasi (monev) dan pengawasan. Dalam konteks pelaksanaan program PEMP bagi masyarakat di desa Parangtritis, partisipasi masyarakat pesisir yang mencakup setiap tahapan program/kegiatan pemberdayaan mulai dari perencanaan sampai dengan monev dan pengawasannya hanya dapat direalisasikan pada level kelompok, yakni terjadi pada komunitas yang terhimpun dalam wadah koperasi wisata "Mina Bahari 45".

b. Peningkatan Kapasitas Masyarakat Pesisir

Dalam pelaksanaan program PEMP berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat pesisir kabupaten Bantul dengan menyelenggarakan berbagai macam pelatihan. Pelatihan dibedakan dalam dua jenis dilihat dari sasaran pesertanya, yang *pertama*, pelatihan-pelatihan dengan sasaran berbagi kelompok-kelompok masyarakat pesisir yang tergabung dalam Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP) meliputi kelompok nelayan, kelompok perempuan pesisir dan kelompok pelaku usaha pasca penangkapan ikan (pedagang ikan segar dan olahan) serta kelompok kelembagaan agama/adat. *Kedua*, pelatihan dengan sasaran para personil yang telah

terpilih -melalui mekanisme tertentu- untuk memperoleh mandat atau kepercayaan sebagai pengelola lembaga-lembaga dan unit-unit usaha dalam rangka program PEMP. Untuk program PEMP pelatihan jenis kedua ini diperuntukkan bagi para personil pengelola atau pengurus kelembagaan-kelembagaan yang terdiri dari pengelola Pusat Pemberdayaan dan Pelayanan Masyarakat Pesisir (P3MP), pengelola Paguyuban Perempuan Pesisir "Niswati Bahari", dan pengelola Paguyuban Lembaga Keagamaan/Adat.

Dari dua kategori pelatihan dalam kerangka peningkatan kapasitas masyarakat dalam program PEMP diperoleh temuan berikut: *Pertama*, pelatihan manajemen usaha yang diikuti oleh perwakilan atau utusan dari kelompok-kelompok masyarakat pemanfaat (KMP) yang ada merupakan pelatihan yang paling berhasil, tepat sasaran dan dapat dirasakan manfaatnya oleh para peserta pelatihan. Indikasi ini terlihat pada dampak yang timbul berupa kemampuan dari beberapa orang dalam mengembangkan atau memperluas usaha, kemampuan mengakses permodalan pada koperasi, LKM Swamitra Mina atau perbankan lainnya serta wawasan atau pandangan ke depan terkait dengan bagaimana upaya-upaya mempertahankan kelangsungan usaha telah dilakukan. *Kedua*, pelatihan pengolahan ikan dan hasil laut, dari segi *skills* dapat dikatakan berhasil karena masyarakat dapat membuat ikan/hasil laut lainnya dalam bentuk olahan seperti abon ikan, bakso ikan, dan produk olahan lainnya, tetapi persoalan besar yang dihadapi adalah bagaimana memasarkan produk-produk olahan tersebut menjadi produk

komersial yang laku di pasaran sehingga dapat menjadi produk yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan dapat memberikan keuntungan bagi produsennya.

Ketiga, pelatihan Navigasi Pelayaran dan Kenelayanan, hasil yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat di antaranya adalah pengetahuan praktis yang berkaitan pemahaman seluk-beluk permesinan kapal (mesin tempel) dan cara perawatan mesin kapal, pemahaman berbagai karakteristik jaring dan peralatan tangkap, dan pengenalan area potensial ikan serta pemahaman musim. Sedangkan yang berhubungan kenavigasian dan pelayaran dapat dikatakan tidak ada hasil atau kemanfaatannya sama sekali. Hal ini terutama disebabkan karena terdapat perbedaan antara konsep pelatihan dengan kondisi realitas masyarakat nelayan setempat. Program-program dan materi pelatihan kenavigasian dirancang dengan kurikulum atau materi-materi yang berhubungan dengan navigasi pelayaran menggunakan Kapal Motor (KM) dengan kekuatan mesin di atas 10 GT (*gross tonnage*), sementara kondisi riil masyarakat nelayan di kabupaten Bantul termasuk sarana dermaga kapal ikan di wilayah kabupaten Bantul tidak ada sama sekali yang menggunakan kapal motor dengan mesin berkekuatan di atas 10 GT. Yang ada adalah nelayan dengan menggunakan perahu kecil dengan mesin tempel, PMT (Perahu Motor Tempel) dengan kekuatan maksimal 15 PK saja.

Keempat, pelatihan bagi pengelola lembaga-lembaga pemberdayaan yang benar-benar dirasakan manfaat dan hasilnya baik bagi peserta diklat sendiri

maupun masyarakat sasaran program secara luas adalah pelatihan yang diperuntukkan bagi Tenaga Pendamping Desa dan pelatihan bagi pengelola Klinik Bisnis. Pelatihan bagi pengelola kedua kelembagaan tersebut benar-benar memberi dampak positif karena dapat menambah beberapa pengetahuan seperti seluk-beluk bagaimana memahami karakteristik masyarakat desa dan karakteristik masyarakat desa pesisir, pendekatan-pendekatan apa saja yang dapat dilakukan, teknik komunikasi dengan masyarakat desa dan sebagainya. Sedangkan pelatihan bagi pengelola P3MP dapat dikatakan tidak ada hasilnya sama sekali yang dapat dirasakan oleh masyarakat, karena terdapat kesalahan yang sangat mendasar yakni konsep pembentukan kelembagaan yang masih sangat kabur. Lembaga P3MP yang semula dirancang atas kerjasama di tingkat pusat antara Dirjen Kelautan dan Pulau-Pulau Kecil DKP dengan Dirjen Pendidikan Luar Sekolah Depdiknas untuk memfasilitasi program-program pelatihan bagi masyarakat pesisir ternyata pada operasional di lapangan tidak dapat dilaksanakan sama sekali.

c. Kemandirian Masyarakat Pesisir

Kemandirian secara nyata dapat ditunjukkan oleh masyarakat sasaran dalam 2 (dua) bentuk, *pertama*, kemandirian dalam menetapkan sendiri bidang/jenis usaha atau profesi/ pekerjaan apa yang dapat dilakukan sendiri tanpa terikat kepada orang lain, seperti keputusan melakukan usaha dagang ikan (bakul ikan), buka warung makan

atau toko kelontong, keputusan beralih profesi menjadi nelayan penangkap ikan, menjadi bakul ikan, dan bahkan menjadi juru parkir. *Kedua*, kemandirian dalam bentuk pengambilan keputusan berinvestasi atau pencarian sumber dana permodalan untuk mengembangkan atau memperluas usaha yang telah dilakukan. Kemandirian dalam bentuk ini, seseorang akan memutuskan sendiri apakah akan menambah modal untuk mengembangkan usaha, berapa besar tambahan modal yang ia butuhkan, serta dari mana atau kepada pihak mana permohonan pinjaman dapat ia ajukan apakah kepada koperasi, kepada LKM atau kepada pihak lainnya.

Empat faktor yang membuat masyarakat jadi mandiri : (1) Karena "dipaksa" oleh keadaan seperti halnya dicerai atau ditinggal mati suami sehingga terpaksa harus mencari nafkah seorang diri untuk menghidupi diri dan anak-anaknya, atau karena keadaan, pada saat kebutuhan hidup semakin lama semakin besar, sedangkan sumber penghasilan sangat terbatas atau bahkan tidak menentu. (2) Keberanian seseorang dalam mengambil keputusan tertentu yang akan berdampak besar dalam kehidupannya, seperti halnya keberanian untuk beralih profesi dari petani menjadi nelayan, dari seorang ibu rumah tangga menjadi pedagang, dari buruh menjadi pengusaha atau wira-swasta, dan lain-lain. (3) Jiwa wirausaha yang tertanam dalam diri seseorang. (4) Suasana lingkungan yang memang mendukung terciptanya kemandirian masyarakat baik lingkungan fisik-geografis maupun lingkungan sosial yang ada di kawasan itu termasuk dalam hal ini kebijakan-kebijakan pemerintah

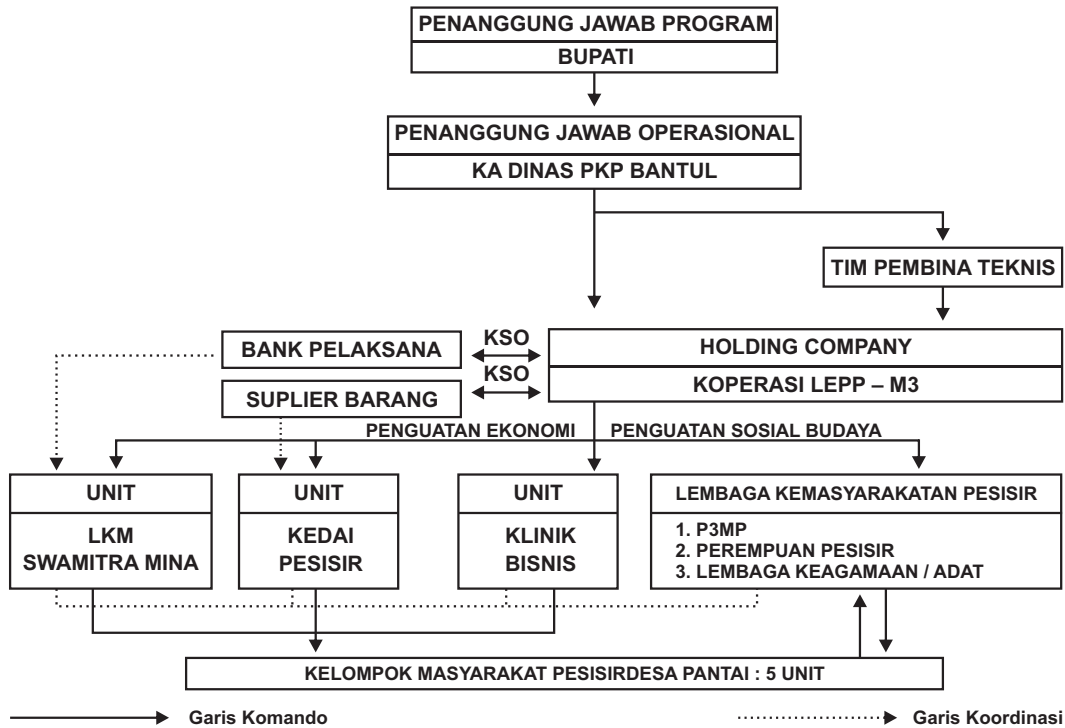
atau pemilik otoritas tertentu yang bersifat kondusif yang memungkinkan berkembangnya segala potensi yang ada.

2. Perspektif Komunitas dalam Pelaksanaan Program PEMP

d. Penguatan Kelembagaan Masyarakat Pesisir

Kelembagaan yang ada (dibentuk) untuk melaksanakan program PEMP secara berkesinambungan seperti ditampilkan gambar 1. Dalam gambar tersebut terlihat bawah secara hierarkhis penanggungjawab program ada pada Bupati Bantul, sedangkan sebagai penanggungjawab operasional adalah Kepala Dinas Peternakan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul yang selanjutnya Kepala Dinas PKP membentuk sebuah tim yang diberi nama dengan Tim Pembina Teknis. Sesuai dengan namanya, tim ini bertugas untuk secara langsung melaksanakan pembinaan teknis terhadap kelembagaan yang telah ada yakni Koperasi LEPP-M3 sebagai *holding company* beserta kelembagaan atau unit-unit usaha di bawah LEPP-M3 pada setiap program pemberdayaan masyarakat pesisir dengan selalu berkoordinasi dengan Tim Konsultan pelaksana program. Selanjutnya koperasi LEPP-M3 menjalin kerjasama operasional (KSO) dengan Bank Pelaksana yakni Bank Bukopin maupun dengan *Supplier* Barang sesuai dengan kesepakatan dan peraturan perundangan yang berlaku dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam program PEMP di kabupaten Bantul.

Gambar
KELEMBAGAAN PENGELOLA PROGRAM PEMP
KABUPATEN BANTUL



Sumber : Mursumartinah, Kepala Dinas Peternakan Kelautan dan Perikanan Perikanan, 2008

Dari gambar di atas dapat diketahui pula bahwa dari aspek kelembagaan yang ada, koperasi LEPP-M3 diharapkan menjadi *holding company* yang merupakan payung dari semua unit kegiatan dalam rangka memberdayakan masyarakat pesisir sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya. Untuk dapat mencapai tujuan itu, program-program dan unit-unit kegiatan diharapkan dapat menyentuh dua aspek sekaligus yakni aspek penguatan ekonomi dan aspek penguatan sosial-budaya. Kedua aspek itu diharapkan dapat saling mengisi dan berjalan beriringan dalam mengupayakan tercapainya tujuan yang diharapkan dalam setiap program pemberdayaan yakni menciptakan tingkat kesejahte-

raan masyarakat pesisir yang semakin baik. Oleh karena itu kelembagaan yang dibentuk juga diarahkan pada lembaga atau unit-unit usaha yang dapat melaksanakan program-program penguatan aspek ekonomi dan penguatan aspek sosial-budaya. Sampai dengan saat penelitian dilakukan dari aspek penguatan ekonomi, telah dibentuk 3 (tiga) buah lembaga atau unit usaha yakni LKM Swamitra Mina, Kedai Pesisir, dan Klinik Bisnis, sedangkan dari aspek penguatan sosial-budaya juga telah terbentuk 3 (tiga) buah lembaga yakni Pusat Pemberdayaan dan Pelayanan Masyarakat Pesisir (P3MP), Paguyuban Perempuan Pesisir dan Paguyuban Lembaga Keagamaan/Adat.

Selain keenam lembaga yang memang dibentuk untuk untuk pelaksanaan program PEMP tersebut, masih ada kelembagaan yang memang sudah exist atau sudah lebih dahulu ada dalam bentuk koperasi yakni Koperasi Wisata Mina Bahari 45. Kelompok Nelayan "Mina Bahari 45" yang pusat kegiatannya berada di kawasan TPI Depok Parangtritis didirikan tahun 1998 sebagai wadah berhimpunnya kelompok nelayan yang merupakan embrio atau cikal-bakal keberadaan nelayan di desa Parangtritis. Data yang dihimpun oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Kecamatan Kretek tahun 2007 mendeskripsikan Kelompok Mina Bahari 45 yang beralamat di dusun Depok Parangtritis Kretek tergolong kelompok kategori madya, didirikan pada tanggal 10 Oktober 1998 dengan susunan pengurus Ketua : Topo, Sekretaris: Sarjuno dan Bendahara: Wadiman, mempunyai anggota sejumlah 80 orang (Petrus Suhartono, PPL Kecamatan Kretek, 2007).

Aspek penguatan kelembagaan selain dalam arti institusi juga terdapat penguatan kelembagaan dalam arti pranata atau tatanan sosial yang menjadi penuntun atau pedoman tingkah laku sosial dalam komunitas bersangkutan. Dari aspek ini pranata sosial yang telah disepakati oleh komunitas sosial di kawasan TPI Depok adalah berupa dua kesepakatan besar, yakni kesepakatan untuk menjadikan acara tradisi "Labuhan" atau "Sedekah Laut" untuk diubah dari acara yang tadinya cenderung bersifat hura-hura dan mengarah ke tindakan "syirik" diluruskan menjadi lebih bernilai dari sisi religi (Islam), dari akar kata "shodaqoh".

Kesepakatan besar yang kedua adalah kesepakatan bagi semua *stakeholders* di kawasan TPI Depok untuk tidak melakukan/mengadakan tindakan-tindakan kemaksiatan seperti minuman keras dan prostitusi yang melanggar norma agama. Selain itu kesepakatan untuk memberi jaminan kenyamanan bagi pengunjung serta menjauhkan dari berbagai penyakit sosial seperti tidak diperbolehkannya pengamen/mengamen serta pedagang asongan di kawasan TPI Depok.

e. Kemitraan dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Ada beberapa model kemitraan dalam implementasi program PEMP di kabupaten Bantul. *Pertama*, kemitraan semu atau *pseudo-partnership*, terjadi antara instansi pemerintah dalam hal ini Dinas PKP kabupaten Bantul dengan beberapa Konsultan Manajemen sebagai pihak yang mendapat kepercayaan melalui penunjukan oleh Dinas PKP dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu dalam program PEMP. Penunjukkan dilakukan karena ketentuan peraturan perundangan memang mengharuskan demikian khususnya yang diatur oleh Pemerintah Pusat di dalam Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diperbaharui dengan Keputusan Presiden Nomor 61 tahun 2004. Kemitraan *pseudo-partnership* juga terjadi antara Koperasi Mina Bahari 45 dengan Dinas KPP Kabupaten Bantul khususnya dilakukan dalam kerangka pelaksanaan program PEMP yang dimulai sejak tahun 2001 diantaranya

dalam pengadaan kapal dan sarana prasarana kelengkapan alat tangkap. Dari pihak Dinas KPP kabupaten Bantul, sesuai alokasi dana dan peruntukannya pada beberapa program PEMP terutama pada awal peluncuran program di mana koperasi LKM Swamitra Mina belum terbentuk (LKM Swamitra Mina dibentuk tahun 2004), pihak Dinas mengalokasikan sejumlah dana untuk pengadaan beberapa unit kapal dan peralatan tangkap kepada beberapa orang nelayan anggota kelompok Mina Bahari 45 melalui koperasi LEPP-M3 yang kemudian oleh pengelola LEPP-M3 dana tersebut dilimpahkan kepada koperasi Mina Bahari 45 untuk kemudian disalurkan kepada anggota koperasi.

Kedua, mutualism-partnership atau kemitraan mutualistik (Sulistiyani) atau kemitraan usaha antar sektor (Kartasasmita). Kerjasama kemitraan yang bersifat mutualistik atau kerjasama usaha antar sektor sudah mulai dilakukan oleh beberapa pengelola dari unit-unit usaha di bawah koperasi LEPP-M3 antara lain oleh pengelola Klinik Bisnis dan oleh Kedai Pesisir. Sebagai tahap permulaan untuk perintisan kerjasama kemitraan, pihak Klinik Bisnis menginventarisasi beberapa *stakeholders* yang melakukan bisnis bidang perikanan yang ada di kabupaten Bantul dan sekitarnya seperti halnya pedagang ikan, pedagang bibit ikan, pedagang pakan ikan, lembaga keuangan bidang perikanan, koperasi, dan pihak-pihak tempat berkonsultasi seperti Tim Pendamping Desa (TPD), Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), dan sebagainya. Dari hasil inventarisasi tersebut, dengan seizin pihak-pihak bersangkutan oleh pengelola Klinik Bisnis disusun

menjadi sebuah leaflet atau brosur yang memuat beberapa informasi singkat (semacam *company profile*) sederhana, untuk selanjutnya disosialisasikan kepada masyarakat sasaran dalam berbagai kesempatan saat melakukan tugas pendampingan usaha kepada masyarakat.

Ketiga, kemitraan antar skala usaha, terjadi antara Koperasi LEPP-M3 kabupaten Bantul dengan Bank Bukopin Cabang Yogyakarta. Kerjasama ini dilakukan sebagai perwujudan dan realisasi atas komitmen bersama di tingkat pusat yakni antara Departemen Kelautan dan Perikanan dengan Bank-bank Pelaksana di daerah yang telah ditetapkan dalam rangka pelaksanaan program PEMP. (telah diuraikan pada bab Deskripsi Program). Bank Pelaksana untuk program-program PEMP kabupaten Bantul adalah Bank Bukopin Cabang Yogyakarta. Atas dasar kerjasama tersebut selanjutnya LEPP-M3 Kabupaten Bantul membentuk unit usaha LKM Swamitra Mina (tahun 2004) yang mengemban tanggungjawab dalam mengelola dana-dana program PEMP dari Dinas KPP Kabupaten Bantul maupun dana di luar program PEMP khususnya dari Bank Bukopin sendiri yang akan disalurkan kepada masyarakat.

Keempat, kemitraan dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan iptek dilakukan pada hampir seluruh kegiatan yang dilakukan dalam program PEMP khususnya kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas masyarakat (*capacity building*) di kabupaten Bantul dilaksanakan menggunakan pola kerjasama kemitraan antara Dinas KPP

Kabupaten Bantul dengan beberapa *stakeholders* yang dinilai memiliki kapasitas bidang-bidang tertentu sesuai jenis kegiatan pelatihan yang telah diprogramkan. Dengan mekanisme yang diatur dalam Keppres 80 tahun 2003 pihak Dinas KPP menetapkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh mitra kerjanya termasuk dalam hal ini kemampuan menyelenggarakan program pengembangan SDM dan iptek dengan menyediakan materi dan instruktur yang benar-benar menguasai bidang keahlian tertentu.

Mencermati analisis yang telah diuraikan, dapat digarisbawahi bahwa keberhasilan pelaksanaan program PEMP untuk memberdayakan masyarakat pesisir dapat dilihat dari pelaksanaan yang mempertimbangkan bobot atau kualitas dalam kedua perspektif

individual dan komunitas meliputi kelima dimensi secara komprehensif dan integral. Dalam hal ini, secara kualitatif dilihat dari dimensi partisipasi masyarakat, peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam perspektif individual, serta dari dimensi penguatan kelembagaan dan kemitraan dalam perspektif komunitas, pemberdayaan masyarakat pesisir dapat dibedakan dalam 3 (tiga) level pemberdayaan masyarakat sebagaimana disajikan pada tabel. Dengan tabel ini pula sekaligus menunjukkan model pemberdayaan bagi masyarakat pesisir di kabupaten Bantul yang direkomendasikan dapat dijadikan model bagi program-program pemberdayaan untuk mengatasi problema kemiskinan pada komunitas masyarakat pesisir dari desa-desa lainnya.

Tabel : Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Dimensi	Model Pemberdayaan		
	Level I	Level II	Level III
Partisipasi	Partisipasi riil (<i>real participation</i>)	Partisipasi semu → berubah jadi riil (<i>quasi → to real participation</i>)	Partisipasi semu (<i>quasi participation</i>)
Peningkatan Kapasitas	Diklat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat (<i>adaptif</i>)	Diklat yang membekali kemampuan mengembangkan kreativitas dan memperkaya wacana	Diklat yang membangun motivasi untuk melakukan usaha, yang dapat mengubah mindset menjadi action/tindakan
Kemandirian	Pemahaman masyarakat yang kuat atas semua proses dalam kegiatan usaha	Perlu pendampingan, kemampuan melakukan dan mengembangkan usaha masih perlu dibina	Perlu bimbingan terus-menerus untuk memberi arahan/menunjukkan peluang
Penguatan Kelembagaan	Lembaga yang berkomitmen tinggi dalam mengembangkan <i>entrepreneurship</i> dan yang menjamin keberlangsungan (<i>sustainability</i>) program	Lembaga yang selalu membimbing dan memandu masyarakat dalam memanfaatkan secara optimal potensi sumberdaya yang ada	Lembaga memfasilitasi berbagai kebutuhan, masyarakat dapat berimprovisasi dan berinovasi di dalamnya
Kemitraan	Kemitraan mutualistik (<i>mutualism-partnership</i>)	Kemitraan antar skala usaha (kuat 'lemah), pola "bapak angkat"	Kemitraan semu (<i>pseudo-partnership</i>)

Sumber: diolah dan diinterpretasikan dari hasil analisis data

Dengan model yang tersaji pada tabel tersebut, pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan dengan menggunakan model yang berbeda-beda, disesuaikan dengan tingkatan atau level pemberdayaan masing-masing. Pemberdayaan paling ideal adalah apabila dalam pelaksanaannya berada/mengarah pada Level I untuk kelima dimensi pemberdayaan yang ada. Sedangkan pada Level III merupakan level terendah atau level minimal dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan.

F. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan, diperoleh kesimpulan:

1. Pelaksanaan program PEMP bagi masyarakat pesisir kabupaten Bantul berada pada level II (menengah), yang ditandai dengan (a) Partisipasi masyarakat dalam beberapa kegiatan pada permulaannya masih semu meskipun pada beberapa komunitas sudah menunjukkan *the real participation*. (b) Beberapa kegiatan pelatihan mengarah pada diklat yang memperkaya wacana dan kemampuan mengembangkan kreativitas, namun belum sepenuhnya disesuaikan (*adaptif*) dengan kebutuhan masyarakat setempat. (c) Masyarakat masih memerlukan pendampingan dan pembinaan dalam melakukan usaha mulai dari proses produksi sampai dengan

pemasarannya. (d) Belum semua lembaga pemberdayaan mempunyai komitmen yang tinggi dalam mengembangkan *entrepreneurship*, demikian juga kegiatan lembaga belum menjamin kesinambungan (*sustainability*) atas program-program pemberdayaan. (e) Kemitraan yang ada masih bersifat antar skala usaha dengan pola hubungan bapak asuh - anak angkat, belum bersifat hubungan saling menguntungkan (*mutualism-partnership*).

2. Kelembagaan pemberdayaan yang ada adalah Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir Mikro Mitra Mina disingkat LEPP-M3 berbentuk koperasi yang dibentuk di tingkat kabupaten sebagai *holding company* yang membawahi semua lembaga atau unit usaha untuk memberdayakan masyarakat pesisir. Lembaga-lembaga atau unit usaha di bawah naungan LEPP-M3 meliputi lembaga yang menjalankan usaha penguatan bidang ekonomi dan penguatan bidang sosial-budaya. Lembaga tersebut adalah LKM Swamitra Mina, Kedai Pesisir dan Klinik Bisnis untuk bidang ekonomi, serta Pusat Pemberdayaan dan Pelayanan Masyarakat Pesisir (P3MP), Paguyuban Perempuan Pesisir "Niswati Bahari" dan Lembaga Keagamaan/Adat untuk bidang sosial-budaya.

Rekomendasi

Untuk dapat menuju pemberdayaan masyarakat pada level tertinggi (level I), maka harus dilakukan dan ditingkatkan :

1. Sosialisasi berkelanjutan dengan memanfaatkan seluruh media yang ada perlu terus dilakukan agar tumbuh motivasi yang kuat bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan.
2. Program diklat harus selalu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat sasaran.
3. Lembaga-lembaga pemberdayaan benar-benar diarahkan untuk menumbuhkan dan mengembangkan jiwa *entrepreneurship* bagi masyarakat.
4. Kerjasama kemitraan diperluas atas dasar pertimbangan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak (*mutualism partnership*).
5. Bimbingan dan pembinaan perlu terus-menerus dilakukan oleh pemerintah dan dinas terkait seperti Dinas Perekonomian Perdagangan dan Koperasi, Dinas Pariwisata, Dinas PKP, dan instansi lainnya untuk menjaga dan mempertahankan kelangsungan kegiatan lembaga-lembaga pemberdayaan yang telah ada/dibentuk maupun untuk tetap menjaga aktivitas kelangsungan usaha kelompok masyarakat pemanfaat program PEMP di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan 2003, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta
- Darwin, Muhadjir M., 2007, *Peran CSR dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)*, Modul pelatihan disampaikan dalam Pelatihan Corporate Social Responsibility yang diselenggarakan sebagai kerjasama antara Magister Studi Kependudukan Universitas Gadjah Mada (MSK-UGM) dengan PT Pupuk Kaltim tanggal 16-20 Juli 2007.
- Departemen Kelautan dan Perikanan, 2004, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Direktoratjendral Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, *Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Tahun 2004*
- Kartasasmita, Ginandjar, 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, PT Pustaka Cidesindo, Jakarta
- Moeljarto, Vidhyandika, "Pemberdayaan Kelompok Miskin Melalui Program IDT", dalam Prijono, Onny S dan A.M.W. Pranarka (penyunting) 1996, *Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, CSIS, Jakarta
- Moleong, Lexy J. 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, edisi revisi
- Numberi, Freddy, Menteri Kelautan dan Perikanan (2004) dalam Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Propinsi DIY, *Laporan Peringatan Hari Nusantara Tahun 2004 Bantul – Yogyakarta*, Panitia Peringatan Hari Nusantara 2004 Propinsi D.I. Yogyakarta
- Prijono, Onny S dan A.M.W. Pranarka (penyunting) 1996, *Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, CSIS, Jakarta
- Soetomo, 2006. *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*, Pustaka Relajar, Yogyakarta
- Soetrisno, Loekman, 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*, Kanisius, Yogyakarta
- Suharto, Edi, 2005, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Refika Aditama, Bandung
- Sulistiyani, Ambar Teguh, 2004, *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*, Gava Media, Yogyakarta

Sumodiningrat, Gunawan, 1997. *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*, edisi kedua, PT Bina Rena Pariwisata, Jakarta

Sumodiningrat, Gunawan, 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Sunartiningih, Agnes (editor), 2004. *Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Institusi Lokal*, Aditya Media, Yogyakarta

Dokumen-dokumen :

CV Karya Mandiri Sejahtera, 2007, *Laporan Pendahuluan dan Laporan Perkembangan Pekerjaan Konsultasi Manajemen Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) Kabupaten Bantul TA 2007*, Dinas Peternakan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul, Yogyakarta

Data Monografi Desa dan Kelurahan Tahun 2007, Desa Parangtritis Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul

Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2005, *Survey Sosial Ekonomi Desa Pantai Dalam Rangka Penyusunan Profil Wilayah Pengembangan Pesisir Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005*

Keputusan Bupati Bantul Nomor 229 Tahun 2008 tanggal 10 September 2008 tentang *Kelompok Pemberdayaan Perempuan Pesisir Niswati Bahari Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Kabupaten Bantul Tahun 2008*

PT Gama Multi Usaha Mandiri, 2007. *Laporan II (Laporan Antara) Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Partisipasi Lembaga Keagamaan/Adat pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir*, Dinas Peternakan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul

Leksono, Untung, 2008. *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Mitra Bahari (2006), *Proposal Pelatihan Penggunaan Alat Navigasi dan Keselamatan di Laut bagi Nelayan Propinsi DIY*, Konsorsium Program Mitra Bahari Regional Center Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Mursumartinah, Kepala Dinas PKP Kabupaten Bantul, 2008, *Pelaksanaan Program PEMP di Kabupaten Bantul*, power point disampaikan pada Sosialisasi Program PEMP Tahun 2008 Kabupaten Bantul, tanggal 11 Juni 2008

Petrus Suhartono, 2007, *Profile Nelayan Mina Bahari 45 Depok Parangtritis*, PPL Kecamatan Kretek, Bantul

Subagyo, Hari, 2004, *Hari Nusantara: Tantangan Perspektif Kenegarawanan Elite Politik*, *Harian Kedaulatan Rakyat* 13 Desember 2004, dikutip dari Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Propinsi DIY, *Laporan Peringatan Hari Nusantara Tahun 2004 Bantul – Yogyakarta*, Panitia Peringatan Hari Nusantara 2004 Propinsi D.I. Yogyakarta

Website Internet :

Perikanan Tangkap Indonesia: Suatu Pendekatan Filosofis dan Analisis Kebijakan (<http://www.dkp.go.id/content.php?c=1823>),

Syarief, Efrizal, tanpa tahun, Staf Teknis Perencanaan di Sekretariat Koordinasi Pengembangan Ekonomi Lokal Bappenas, *Pembangunan Kelautan dalam Konteks Pemberdayaan masyarakat Pesisir* (<http://www.bappenas.go.id/index.php?module=contentExpress&func=display&ceid=1143-19k->)

Ismawan, Bambang, 2003, *Kemandirian, statu Refleksi*, *Jurnal Ekonomi Rakyat* Tahun II Nomor 3, Mei 2003 (<http://www.ekonomirakyat.org>)